

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah proses yang mendasar dan esensial dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara holistik dan memberikan kontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pendidikan merupakan sistem yang kompleks dengan banyak subsistem dan pemangku kepentingan yang saling berhubungan. Setiap keputusan yang diambil pada salah satu komponen pada satu jenjang pendidikan membawa perubahan pada komponen dan subsistem lainnya. Keterkaitan ini membutuhkan kebijakan dan pembuat keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang koheren dan konsisten serta kerangka strategis tersedia dari perspektif sektor dan sistem (UNESCO, 2022).

Kebijakan pendidikan merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas pendidikan untuk mengatur, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendidikan dalam suatu sistem atau negara (Putra, 2021). Kebijakan pendidikan melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan. Ini mencakup penetapan tujuan, alokasi sumber daya, aturan, program, dan langkah-langkah yang dirancang untuk mengubah atau memperbaiki sistem pendidikan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dan implementasi program-program yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hal kualitas pendidikan, aksesibilitas, kesetaraan, dan peningkatan hasil pendidikan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendikbud telah menekankan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam urusan pendidikan. Kewenangan di pusat akan dikurangi dan kewenangan di daerah akan diperbesar. Berdasar aturan ini setiap daerah memiliki kebijakan pendidikan yang berbeda-beda tergantung pada konteks, nilai-nilai budaya, dan tantangan yang dihadapi (Kemendagri, 2014).

Kabupaten Karanganyar melaksanakan kewenangan Pendidikan ini dengan menerapkan aturan baru Pendidikan. Pada tahun 2022 terdapat kebijakan baru di Kabupaten Karanganyar (Disdikbud, 2022) yang tertuang dalam surat edaran Bupati Karanganyar Nomor 421/3.047.4 tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Karanganyar.

Dalam surat edaran tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi peserta didik di lingkungan keluarga serta upaya peningkatan kapasitas manajemen pada satuan pendidikan, maka diperlukan pengaturan kegiatan pendidikan di satuan Pendidikan. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP dilaksanakan selama 5 hari yakni Senin – Jumat (TribunJateng.com, 2022). Pertimbangan lain dalam pelaksanaan aturan ini bahwa kurikulum merdeka membangun karakter anak, keunikan anak, sehingga anak perlu waktu lebih panjang untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan juga penyesuaian hari kerja aparatur sipil negara (ASN) di Karanganyar. Penerapan lima hari sekolah juga diharapkan mampu memberikan peluang waktu lebih banyak bagi murid untuk bersosialisasi dan mengasah kemampuan ketrampilan masing-masing.

Kebijakan lima hari sekolah ini menuai kontra. Kebijakan ini disebut-sebut akan memperparah tingkah laku anak ke depannya. Dua Ormas besar di Karanganyar, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendesak Disdikbud Karanganyar agar mengkaji ulang kebijakan lima hari sekolah (Joglosemarnews.com, 2022). Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Karanganyar mengatakan sebenarnya penerapan lima hari sekolah itu bukan asal ikut-ikutan melainkan ada persyaratan yang kompleks yang harus dilakukan. Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Karanganyar juga mengatakan lima hari masuk sekolah menimbulkan berbagai persoalan. Pemerintah daerah harus legowo melihat dampak yang kurang baik tersebut dan harus rela mengkaji ulang (Joglosemarnews.com, 2022).

Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Karanganyar mengungkapkan selama Januari-September Tahun 2022, ada sebanyak 149 permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan

Agama (PA) Karanganyar (Solopos.com, 2022). Pemohon dispensasi nikah mayoritas calon pengantin putri yang sudah berbadan dua. Pergaulan bebas hingga pengaruh gadget menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus anak hamil di luar nikah.

Penelitian di Kabupaten Karanganyar mendukung pernyataan dari Kantor Kementerian Agama tersebut. Penelitian Cahyani memberikan hasil tentang bentuk-bentuk kenakalan yang terjadi di SMP, yaitu membolos, merokok, berpacaran, merusak fasilitas sekolah, *bullying*, ugali-ugalan dan mengendarai sepeda motor tanpa SIM (Cahyani, 2021). Faktor penyebab kenakalan remaja yaitu faktor dari dalam diri anak, faktor keluarga dan faktor lingkungan sekolah. Tiasari (2022) juga menemukan fakta tentang gaya berpacaran remaja di Mojogedang, Karanganyar yang menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan.

Kebijakan Pendidikan 5 hari sekolah tidak hanya berpengaruh pada perilaku remaja. Penelitian Prastowo mengungkapkan bahwa program sekolah lima hari seminggu diatur oleh Pasal 2 Peraturan Menteri (Permendikbud) yang menyatakan bahwa siswa harus bersekolah delapan jam sehari atau 40 jam selama seminggu (Prastowo & Raharja, 2020). Diungkapkan dalam penelitian tersebut program lima hari sekolah tidak dilaksanakan secara optimal karena beberapa faktor, antara lain faktor fisik yang mendasari kinerja guru dan siswa serta faktor psikologis, ekonomi, dan sosiologis yang membentuk pendidikan karakter siswa dan tingkatannya dari hubungan dengan orang tua.

Hasil pelaksanaan sekolah 5 hari dalam aspek psikologis belum efektif karena ketidakkonsistenan tujuan sekolah 5 hari dan dampak negatifnya (Novita Sari & Lestari, 2019). Penelitian di Cina (Leow & Wen, 2017) anak-anak yang mengikuti program sehari penuh yang lebih intensif menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pada salah satu dari 5 ukuran hasil akademik dan sosial yang diperiksa. Penelitian (Tran & Pasquier-Doumer, 2019) di Vietnam juga menunjukkan tidak ada bukti hubungan positif antara sekolah 5 hari belajar dan kemajuan belajar.

Implementasi kebijakan Pendidikan di Kabupaten Karanganyar ini juga belum terlaksana secara optimal. Sebagian sekolah hanya sekedar menyusun jadwal masuk dan pulang siswa sesuai aturan selama senin sampai jumat namun

pelaksanaannya berbeda. Sekolah memasukkan anak pukul 7 pagi dan pulang pukul 13.00 sehingga ada perbedaan 2 jam dari aturan. Manajemen sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan guru yang seharusnya setelah pembelajaran selesai dapat melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen dalam bentuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan kompetensi guru atau menyelesaikan administrasi pembelajaran ternyata tidak melaksanakan hal tersebut. Kepala sekolah dan guru memanfaatkan waktu tersebut untuk istirahat menunggu waktu pulang atau bahkan guru yang rumahnya dekat dengan sekolah bisa pulang dulu ke rumah dan kembali ke sekolah untuk absen pulang.

Melihat pelaksanaan pembelajaran 5 hari untuk siswa belum terlaksana sesuai harapan, yaitu meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi peserta didik di lingkungan keluarga serta upaya peningkatan kapasitas manajemen pada satuan pendidikan maka perlu di evaluasi pelaksanaannya. Tyler (1950) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasi (Arikunto & Jabar, 2018). Evaluasi ini digunakan untuk melihat ketidaksinkronan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan (Tyler, 1949). Model evaluasi yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented evaluation model*) bisa digunakan karena memiliki beberapa keuntungan dan manfaat dalam melakukan evaluasi program, kebijakan, atau intervensi pendidikan.

Model evaluasi yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented evaluation model*) bisa dimanfaatkan sebagai alat evaluasi karena memiliki kelebihan beberapa hal, yaitu: 1) fokus pada pencapaian tujuan, 2) pengukuran dan pemantauan progres, 3) perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik, 4) akuntabilitas dan transparansi, 5) pembelajaran organisasi. Melalui evaluasi, informasi dan temuan evaluasi digunakan untuk memperbaiki program atau kebijakan di masa depan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, program dapat ditingkatkan dan strategi yang lebih efektif dapat diadopsi.

Penelitian Harahap menggunakan *goal-oriented evaluation model* dari Tyler bertujuan untuk mengevaluasi program pelatihan kepemimpinan. Hasil penelitian mampu menemukan bahwa pelaksanaan diklat kepemimpinan Tingkat III yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

berjalan efektif sesuai dengan ketentuan Perla No.19/2015. Dengan menerapkan pendekatan ini maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya, mulai dari peserta, narasumber, kurikulum, dan evaluasi (Harahap et al., 2022). Penelitian tentang evaluasi pembelajaran pada mata kuliah metodologi penelitian juga dilakukan dengan Model *Goal Oriented* Ralph W. Tyler (Ramdhina, 2022). Fokus penelitian evaluasi ini adalah ketercapaian program pembelajaran yang dianggap penting.

Model evaluasi yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented evaluation model*) adalah pendekatan evaluasi yang fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan dari suatu program, kebijakan, atau intervensi. Model ini dirancang untuk membantu dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan, dan memberikan wawasan tentang efektivitas program. Jadi model ini dipilih untuk melihat permasalahan pelaksanaan sekolah lima hari di Kabupaten Karanganyar dan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan Pendidikan. Berdasar latar belakang di atas maka penelitian ini disusun dengan judul **Analisis Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Karanganyar Berdasar Pendekatan *Goal-Oriented Evaluation Model***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan lima hari sekolah di Kabupaten Karanganyar?
- b. Bagaimana peningkatan kualitas interaksi dan komunikasi peserta didik di lingkungan keluarga?
- c. Bagaimana upaya peningkatan kapasitas manajemen pada satuan pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pendidikan lima hari sekolah di Kabupaten Karanganyar.
- b. Untuk mengetahui peningkatan kualitas interaksi dan komunikasi peserta didik di lingkungan keluarga.
- c. Untuk mengetahui upaya peningkatan kapasitas manajemen pada satuan Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis sehingga dapat membawa manfaat ilmiah.

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan bagi peneliti yang lain terkait kebijakan penyelenggaraan pendidikan lima hari belajar.

b. Secara Praktis

1. Bagi Dinas Pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan Pendidikan berikutnya di Kabupaten Karanganyar.
2. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upaya peningkatan kapasitas manajemen dan kualitas sekolah.
3. Bagi orang tua/wali murid, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pola komunikasi dan interaksi yang positif dengan anak agar mendukung proses pendidikan anak.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam hal kebijakan pendidikan dan implikasinya